



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 900/901/BPKAD/2019
Tanggal : 18/11/2019

No. Koreksi : 572

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Edy

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DYIE 18/11/1912:03



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**

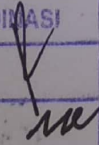
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghapus daftar barang pengguna barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dikarenakan alasan rusak berat sehingga sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam pelayanan belajar mengajar, perlu dilakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna barang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BACIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

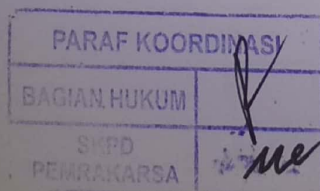
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

PARAF KOORDINASI	
BADIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Daerah serta data dan dokumen kepemilikan Nomor 032.1/010.1/V/BPKAD/2019 tanggal 14 Mei 2019, Usulan Penghapusan Nomor 005/1715/Dikbud tanggal 7 Mei 2019, dan Surat SKTJM Nomor 900/3246/Dikbud tanggal 29 Agustus 2019;



MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU.
- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan karena alasan rusak berat sehingga tidak bisa digunakan dan difungsikan lagi dalam proses belajar mengajar di sekolah, serta membebaskan Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
- KETIGA : Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu untuk melakukan penghapusan dari daftar barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.



KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 WAKIL WALI KOTA PALU, 


SIGIT PURNOMO

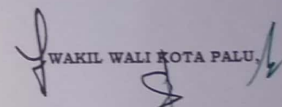
PARAF KOORDINASI	
BACAN HUKUM	
SMPD PENYAKRASA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
 PALU

Nama Sekolah	Nama Gedung	Tahun Perolehan	Jumlah	Luas Bangunan (M2)	Alamat/Lokasi	Kondisi Hilang/Mati B.RR.RB	Total nilai Perolehan (Rp)	Ket.
SD Negeri 21	Gedung Induk	1985	1 Paket		Jl. Delima	RB	144,375,000	Rehap Total
	Gedung Ruang Kelas	1988	1 Paket			RB	611,079,576	Rehap Total
	Gedung Ruang Kelas 1, 3, 4	2013	3 Ruang			RB	152,559,000	Rehap Total
	Perpustakaan	2011	1 Ruang			RB	167,729,000	Rehap Total
	WC/Jamban	2016	1 Paket			RB	49,194,000	Rehap Total
SD Inpres Boyaoge	Gedung Induk	1978	1 Paket		Jl. Delima	RB	38,775,000	Rehap Total
	Gedung Ruang Kelas 1, 3, 4	2012	3 Ruang			RB	260,705,333	Rehap Total
	Perpustakaan	2011	1 Ruang			RB	71,695,000	Rehap Total
	WC/Jamban	2016	1 Paket			RB	45,416,955	Rehap Total
SDN Poboya	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	1963	1 Paket	953.8	Jl. Pue Salangga	RB	989,348,331	Rehap Total
SMP 14 Palu	Ruang Kelas	1988	7 Ruang	707,28 m2	Jln. Letjen Suprpto	RB	1,272,600,000	Rehap Total
SDN 16 Palu	Ruang Kelas	2010	1 Ruang	56 M2	Jln Una-Una	RB	100,800,000	Rehap Total
SDN 23 Palu	Rumah Dinas Guru dan Penjaga Sekolah	2009	2 Ruang	66,50 m2	Jl. Negeriwalda	RB	119,700,000	Rehap Total
SDN 26 Palu	Ruang Kelas	1988	1 Ruang	72 m2	Jl. Dr. Wahidin	RB	129,600,000	Rehap Total
SDN 8 Mamboro	Ruang Kelas	1985	3 Ruang	144 M2	Jl. Trans Sulawesi	RB	226,931,000	Rehap Total
	Bangunan Rumah Dinas	1985	1 Ruang	49 m2	Jl. Trans Sulawesi	RB	97,835,000	Rehap Total
SDN 9 Mamboro	Bangunan Rumah Dinas	1983	1 Ruang	99 m2	Jl. Manthilayo	RB	33,150,000	Rehap Total
SD Inp 11 Liku	Bangunan Rumah Dinas	1980	5 Ruang	108 m2	Jl. Desa Liku	RB	378,000,000	Rehap Total
SDN 5 Kayumalue Ngapa	Bangunan Rumah Dinas	1978	1 Ruang	45 m2	Jl. Trans Sulawesi	RB	17,063,000	Rehap Total
	Bangunan Rumah Dinas	1980	2 Ruang	36 m2	Jl. Trans Sulawesi	RB	19,906,000	Rehap Total
SD Inpres 1 Besusu	Bangunan Rumah Dinas	1996	2 Ruang	84 m2	Jl. Raden Saleh	RB	151,200,000	Rehap Total
	WC	2012	1 Ruang	30 m2	Jl. Raden Saleh	RB	73,525,386	Rehap Total

PARAF KOORDINASI
 BAGIAN HUKUM
 SIRD
 KEPERAKARSA

SD Inpres 2 Besusu	Bangunan Rumah Dinas	1983	1 Ruang	35 m2	Jl. Dr. Wahidin	RB	63,000,000	Rehap Total
SD Inpres 1 Talise	Bangunan Rumah Dinas	1968	1 Ruang	64,38 m2	Jl. Tombolotutu	RB	39,600,000	Rehap Total
	Bangunan Rumah Dinas	1978	1 Ruang	55,53 m2	Jl. Tombolotutu	RB	41,250,000	Rehap Total
SDN Biro	Bangunan Rumah Dinas	1978	1 Ruang	56 m2	Jl. Merak	RB	27,720,000	Rehap Total
SD Inpres 2 Birobuli	Ruang Kelas	1981	1 Ruang	24 M2	Jl. Gelatik	RB	75,600,000	Rehap Total
	Bangunan Rumah Dinas	1978	2 Ruang	210 M2	Jl. Gelatik	RB	37,440,000	Rehap Total
SD Inpres 4 Birobuli	Ruang Kelas	1971	1 Ruang	72 m2	Jl. Abd Saleh	RB	129,600,000	Rehap Total
SD Inpres 5 Birobuli	Bangunan Rumah Dinas	1986	3 Ruang	210 m2	Jl. Banteng	RB	59,400,000	Rehap Total
SDN Watussampu	Bangunan Rumah Dinas	1954	1 Ruang	69,92 m2	Jl. Sungai Malenda	RB	53,500,000	Rehap Total
JUMLAH TOTAL							5,678,297,581	

WAKIL WALI KOTA PALU

M. SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SAKSI PENYAKSI	